

BAB IV

SIMPULAN

Hukum Anak (*Shōnenhou*) di Jepang telah mengalami perubahan, dengan menyesuaikan keadaan masyarakat, khususnya pada kasus pidana yang melibatkan anak. Hukum Anak telah bergeser dari yang berisfat “penekanan pada rehabilitasi” menjadi “penekanan hukuman yang lebih ketat” terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebagai respons terhadap perubahan zaman. Terutama sejak tahun 2000, undang-undang telah berulang kali diubah setelah adanya kasus-kasus berat, dan konsep “*Tokuteishōnen*” diperkenalkan pada tahun 2022. Namun, meskipun fokusnya telah bergeser kepada hukuman yang lebih ketat, ada juga kebutuhan untuk membahas peluang rehabilitasi dan dukungan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat.

Proses pidana terhadap anak di bawah umur di Jepang didasarkan pada pengadilan keluarga yang bertujuan untuk merehabilitasi anak, namun ada kecenderungan yang meningkat terhadap hukuman yang berat terhadap anak, dengan pelanggaran berat yang dirujuk ke pengadilan pidana. Secara khusus, *Tokuteishōnen* yang berusia 18 dan 19 tahun diperlakukan dengan cara yang sama dengan pelaku kasus pidana pada umumnya (dewasa), namun masih berbasis dengan prinsip Hukum Anak yang sebelumnya, yang mana tindakan perlindungan dapat diberikan, serta larangan untuk memberitakan identitas asli mereka telah dicabut.

Meskipun pencabutan larangan pemberitaan identitas asli dapat menyadarkan masyarakat tentang keseriusan pelanggaran dan mencegah terulangnya pelanggaran, ada risiko tinggi bahwa hal tersebut akan menyulitkan anak yang melanggar untuk direhabilitasi dan diintegrasikan kembali ke dalam

masyarakat. Penyebaran dan penyimpanan informasi di internet dikhawatirkan dapat menimbulkan sanksi sosial seumur hidup mereka. Selain itu, diperlukan penanganan yang hati-hati di berbagai sisi, termasuk kerusakan sekunder pada anggota keluarga dan orang lain yang terlibat, dampak emosional pada korban dan keluarga yang berduka, dan keputusan oleh media. Bagaimana menyeimbangkan antara rehabilitasi dan tanggung jawab sosial akan menjadi tantangan besar kedepannya bagi Hukum Anak di Jepang.

Dalam analisis dengan mengaitkan langsung dengan kasus yang terjadi, menunjukkan perubahan besar dalam dinamika pemberitaan identitas pelaku kejahatan anak, terutama akibat perkembangan teknologi dan media sosial. Dalam kasus *Sakakibara*, pemberitaan identitas pelaku oleh media cetak menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan prinsip Hukum Anak yang berfokus pada rehabilitasi. Sementara itu, dalam kasus Kofu, meskipun hukum telah berubah dan memungkinkan pemberitaan identitas untuk *Tokuteishōnen* (18-19 tahun), penyebaran informasi di media sosial terjadi secara luas di luar kendali media resmi, dan dapat menyoroti tantangan baru dalam regulasi hukum anak di era digital. Kedua kasus ini memicu perdebatan antara kepentingan publik untuk mengetahui identitas pelaku dan hak anak untuk rehabilitasi. Selain itu, penyebaran informasi yang tidak terkendali di media sosial juga memperumit perlindungan terhadap korban dan keluarganya. Oleh karena itu, revisi dan adaptasi terhadap Hukum Anak untuk menyeimbangkan keadilan sosial, hak korban, serta perlindungan dan rehabilitasi pelaku di era informasi yang semakin terbuka akan terus diperlukan kedepannya.